

*Dias Pabyantara S.M.*

# **Konstruksi Identitas dan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Kasus Sengketa Ambalat Tahun 2005**

**Dias Pabyantara S.M.**

*Alumnus Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Airlangga*

## **ABSTRACT**

*This paper discussing about the influence of identity for Indonesian Foreign Policy. Using Ambalat dispute as a empirical case, and also constructivism as theoretical framework, this paper argues that Indonesian Foreign Policy towards Ambalat 2005 driven by both archipelago identity and world peace endorser. Systematically, this paper divided into two part. One discussing about the construction of archipelago identity and world peace endorser articulated both historically and normatively by each and every leader of the nation, starting from Sukarno until Susilo Bambang Yudhoyono. Second part discussing specifically about the articulation of both identity as a driven identity of Indonesian Foreign Policy towards Ambalat 2005. Finally, this whole paper argues that Indonesian identity construction has a major influence within Indonesian Foreign Policy making process towards Ambalat dispute 2005.*

**Keywords:** *Identity, Foreign Policy, Ambalat, Constructivism.*

*Tulisan ini mengkaji mengenai pengaruh identitas dalam politik luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat 2005. Menggunakan perspektif konstruktivisme, penulis berargumen bahwa politik luar negeri Indonesia pada kasus Ambalat tahun 2005 dilatar belakangi oleh identitas kepulauan dan pendukung perdamaian dunia. Tulisan ini terdiri dari dua bagian, pertama berargumen bahwa konstruksi identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara pendukung perdamaian dunia diartikulasikan secara historis dan normatif oleh pemimpin yang berkuasa mulai dari Sukarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Bagian kedua membahas mengenai artikulasi kedua identitas tersebut sebagai latar belakang pengambilan keputusan dalam politik luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat tahun 2005. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa konstruksi identitas Indonesia mempengaruhi dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat tahun 2005.*

**Kata-Kata Kunci:** *Identitas, Politik Luar Negeri, Ambalat, Konstruktivisme*

Penelitian ini mengkaji relasi identitas dan politik luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat dengan argumen bahwa politik luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat tahun 2005 dipengaruhi oleh identitas nasional yang membentuk direksi kepentingan nasional dalam artikulasi elit-elit pembuat kebijakan. Identitas nasional Indonesia dibuat oleh faktor historis dan normatif konstitusional. Formulasi identitas demikian terefleksi dalam diskursus kepentingan nasional yang berwujud perlindungan dan penjagaan integritas teritorial serta penegakan perdamaian internasional. Kedua definisi kepentingan inilah yang melahirkan aksi kebijakan diplomasi kooperatif oleh Indonesia terhadap Malaysia dalam kasus Ambalat tahun 2005.

Secara umum studi mengenai politik luar negeri Indonesia dilakukan dengan meninjau dua faktor; material dan ideasional. Beberapa peneliti yang menggunakan analisis material dalam mempelajari politik luar negeri Indonesia antara lain, Dewi Fortuna Anwar menganalisis politik luar negeri Indonesia melalui dimensi politik dan ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan ekonomi dan politik domestik yang mendorong Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri. Dengan menggunakan ASEAN sebagai pusat politik luar negeri Indonesia, analisis mengenai perkembangan politik luar negeri Indonesia dipandang melalui aspek material dan domestik (Anwar 1994). Priyambudi Sulistiyanto menganalisis perubahan politik luar negeri Indonesia terhadap Australia akibat adanya perubahan dalam segi politik domestik dan peran aktor non-negara yang signifikan (Sulistiyanto 2010). Dari penulis lainnya, Donald K. Emerson menyatakan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia telah menempatkan Indonesia dalam posisi strategis dalam ekonomi politik global (Djafar 2004). Rizal Sukma melihat politik luar negeri Indonesia pada masa Suharto adalah sebuah model resistensi terhadap gelombang demokratisasi global (Sukma 2011). Sedangkan Michael Leifer menganalisis Politik Luar Negeri Indonesia berdasarkan posisi dan padangan Indonesia terhadap ASEAN sebagai organisasi regional (Leifer 1983).

Mereka meneliti politik luar negeri Indonesia berdasarkan aspek material domestik yang membentuk kebijakan luar negeri. Sedangkan untuk aspek ideasional, beberapa peneliti yang tercatat pernah melakukan kajian terkait politik luar negeri Indonesia antara lain, I Gede Wahyu Wicaksana yang menyatakan bahwa identitas Islam merupakan salah satu faktor sosial dominan di Indonesia, tetapi tidak terlalu berpengaruh pada pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia dalam konteks hubungan Indonesia dan Pakistan (Wicaksana 2012). Aspiannor Masrie mengkaji tentang pengaruh nilai-nilai individu

Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pengambilan keputusan dalam politik luar negeri Indonesia terkait permasalahan ekonomi dengan Malaysia (Masrie 2012). Sedangkan Dewi Fortuna Anwar menganalisis pembentukan politik luar negeri Indonesia oleh ide-ide tentang nasionalisme yang kemudian membentuk nilai-nilai tentang *Wawasan Nusantara* (Chalmers 1998). Peneliti tersebut menggunakan aspek ideasional dalam menganalisis politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini berada dalam sisi analisis faktor non-material dengan mengacu pada aspek identitas sebagai alat untuk menganalisis politik luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat tahun 2005 sebagai tahun puncak eskalasi konflik Ambalat. Penelitian ini mengambil fokus pada hubungan Indonesia-Malaysia sebagai negara dengan identitas kultural yang realtif sama (Marzali dalam Brahmantyo 2013). Berasal dari garis nenek moyang suku yang sama, Indonesia dan Malaysia setidaknya mempunyai identitas yang hampir sama. Dengan persamaan dan urgensi identitas dalam hubungan Indonesia Malaysia tersebut kemudian membuat pengaruh identitas dalam politik luar negeri Indonesia terhadap Malaysia tahun 2005 dalam kasus Ambalat menarik untuk diteliti.

Menggunakan konstruktivisme sebagai landasan teoritiknya, identitas dalam tulisan ini dimaknai sebagai bentukan interaksi antar negara. Posisi identitas dalam kerangka tersebut adalah sebagai pembentuk kepentingan yang mempengaruhi perilaku negara dalam struktur. Perilaku negara dalam merespon struktur merujuk pada Wilkenfeld adalah salah satu definisi mengenai politik luar negeri. Dalam penelitian ini, definisi politik luar negeri dari Jonathan Wilkenfeld yang menekankan pemaknaan pada aspek aksi dan reaksi pemerintah terhadap fenomena yang terjadi diluar kedaulatan negaranya. Dalam definisi ini, pernyataan dari elite yang mempunyai posisi dalam struktur negara dapat dikategorikan sebagai model politik luar negeri. Proposisi yang dirujuk dalam penelitian ini untuk menganalisis relasi politik luar negeri dan identitas adalah proposisi yang menyatakan bahwa identitas sebagai pembentuk kepentingan yang mempengaruhi politik luar negeri. Tulisan ini menginterpretasi artikulasi pemimpin negara dalam konteks politik luar negeri Indonesia pada tahun 2005 dalam kasus Ambalat. Sebagai pemimpin negara tahun 2005, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi fokus kajian dalam tulisan ini.

## **Historisitas dan Konstruksi Identitas Indonesia**

Konstruksi identitas Indonesia dapat dilihat secara normatif dan historis. Interpretasi normatif dari Undang Undang Dasar 1945, dalam landasan konstitusional Negara Indonesia ini membentuk identitas

kepulauan dan identitas Indonesia sebagai pendukung perdamaian dunia yang termuat dalam pasal 25A dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4. Kemudian dimensi historis dari identitas kepulauan dan pendukung perdamaian dunia telah diartikulasikan oleh setiap pemimpin pemerintahan mulai dari Sukarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Terkait konstruksi normatif dan historis identitas kepulauan dan pendukung perdamaian dunia, penulis berargumen bahwa identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dan pendukung perdamaian dunia menjadi identitas yang diartikulasikan pada setiap periode kepemimpinan presiden yang berkuasa. Kategorisasi dari artikulasi identitas yang menghubungkan setiap artikulasi pemimpin terkait dua identitas diatas adalah bahwa identitas kepulauan diaplikasikan berdasarkan Deklarasi Djuanda 1954 sedangkan identitas pendukung perdamaian dunia diartikulasikan berdasarkan cara-cara diplomasi kooperatif.

Konstruksi identitas Indonesia secara historis didapatkan dari informasi sejarah yang menyebutkan bahwa diskursus mengenai Indonesia telah ada sejak tahun 1275 dicetuskan oleh Raja Kertanegara dengan menggunakan istilah *Cakrawala Mandala Dwipantara* (Kusumoprojo 2009). Kertajaya adalah Raja Kerajaan Singasari yang mengartikan Dwipantara sebagai “pulau antara” yang berasal dari bahasa Sansakerta. *Cakrawala Mandala Dwipantara* merujuk pada gugusan pulau di antara Benua Asia dan Benua Australia (Kusumoprojo 2009).

Setelah runtuhnya kerajaan Singasari pada tahun 1292, Kerajaan Majapahit mengkonstruksi konsepsi kepulauan di antara Benua Asia dan Benua Australia dan dibingkai dalam konsep Nusantara. Melalui Sumpah Palapa, Gajah Mada merujuk nusantara sebagai kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua (Kroef 1951). Penggunaan istilah Nusantara untuk merujuk gugusan Pulau Sumatera sampai Papua pertama kali ditemukan dalam literatur menggunakan Bahasa Jawa pada kisaran abad kedua belas (Kroef 1951)]. Dengan pengaruh Kerajaan Majapahit yang luas, istilah Nusantara kemudian digunakan dengan luas untuk menyebut gugusan Pulau di antara Benua Asia dan Australia, yang sekarang kita kenal dengan Indonesia. Namun seiring runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad keenam belas, penggunaan kata Nusantara untuk merujuk kepulauan di antara Asia dan Australia sempat dilupakan (Kroef 1951).

Konstruksi identitas Nusantara kemudian muncul sebagai penanda gugusan kepulauan Sumatera sampai dengan Kepulauan Rempah-Rempah (sekarang menjadi Maluku) pada abad 19 melalui tulisan Alfred Russel Wallace (Kusumoprojo 2009). Pada abad ini gugusan pulau Sumatera sampai dengan Maluku disebut oleh Wallace sebagai Kepulauan Melayu. Konsepsi kepulauan Indonesia bergeser dari

Nusantara menjadi tumpang tindih dengan Kepulauan Melayu. Hal ini disebabkan partisi yang dilakukan oleh Wallace berdasarkan kesamaan suku yang menghuni teritori tersebut. Implikasinya, kepulauan yang sekarang disebut Indonesia pada jaman abad ke sembilan belas sering diidentikan dengan Kepulauan Melayu dengan mengeksklusi wilayah Papua.

Kemudian beralih kepada masa kolonial, identitas kepulauan nusantara kembali muncul menggantikan identitas Kepulauan Melayu. Nusantara kembali menjadi penanda gugusan kepulauan antara Sumatera sampai Papua ketika Ki Hajar Dewantara mempopulerkan istilah Nusantara untuk menggantikan penyebutan Hindia-Belanda oleh kolonialis (Kroef 1951). Hingga pada tahun 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, istilah nusantara masih menjadi rujukan utama untuk menyebut wilayah kepulauan Indonesia.

Dari informasi sejarah tersebut, kemudian membentuk interpretasi masing-masing pemimpin Indonesia terhadap identitas kepulauan dan pendukung perdamaian dunia. Secara kronologis, Sukarno dalam mengartikulasi identitas kepulauan Indonesia sebagai konsepsi wilayah yang tidak bisa diganggu gugat, dengan jargon NKRI harga mati. Kemudian artikulasi identitas menjaga kemandirian dunia oleh Sukarno diterjemahkan dengan cara-cara non kekerasan seperti mengadakan Konferensi Asia-Afrika. Beralih kepada masa kepemimpinan Suharto, identitas kepulauan oleh Suharto diartikulasikan dengan memperkuat aspek hukum kepulauan Indonesia melalui UNCLOS. Sedangkan identitas menjaga pendukung perdamaian dunia diterjemahkan sebagai penguatan ASEAN sebagai organisasi regional.

Kemudian pada masa pemerintahan Habibie, identitas kepulauan diartikulasikan melalui aspek historis. Identitas kepulauan Indonesia mencakup wilayah yang dicantumkan pada awal proklamasi Indonesia. Sedangkan identitas pendukung perdamaian dunia diterjemahkan melalui proses demokratis dalam memperkuat stabilitas nasional kemudian akan berpengaruh pada stabilitas regional dan global. Sedangkan pada masa pemerintahan Gus Dur, identitas kepulauan Indonesia dimaknai tidak hanya sebagai media transportasi, namun juga media eksploitasi. Sedangkan dalam konteks identitas berperan aktif menjaga perdamaian dunia, Gus Dur mengartikulasikan identitas ini dalam proses yang demokratis dan pluralis. Berbeda dengan Gus Dur, Megawati mengartikulasikan identitas kepulauan sebagai warisan budaya dalam dimensi hukum kelautan Deklarasi Juanda. Sedangkan identitas berperan aktif menjaga kemandirian dunia diartikulasi sebagai memberi perhatian terhadap negara-negara yang termarginalkan dan melalui penguatan kerjasama keamanan regional. Yang terakhir adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengartikulasi identitas

kepulauan Indonesia melalui identitas kolektif sebagai negara anggota ASEAN. Sedangkan identitas berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia diartikulasikan melalui prinsip *Thousand Friends Zero Enemy*.

Pada setiap periode kepemimpinan, terdapat satu kategori penghubung di setiap identitas. Dalam konteks artikulasi identitas kepulauan, kategori yang menghubungkan artikulasi antar periode adalah bahwa identitas kepulauan Indonesia diartikulasikan dengan merujuk pada Deklarasi Djuanda tahun 1957. Sedangkan dalam konteks identitas sebagai pendukung perdamaian dunia, kategori yang menjadi penghubung adalah bahwa identitas tersebut diartikulasikan dengan tidak menggunakan cara-cara diplomasi kooperatif. Setelah menarik kategori penghubung dari artikulasi masing-masing preseiden, selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana kategori tersebut diaplikasikan dalam politik luar negeri Indonesia pada tahun 2005 terkait kasus sengketa Ambalat.

### **Identitas dan Politik Luar Negeri Indonesia pada Kasus Ambalat Tahun 2005**

Ambalat adalah gugusan pulau yang terletak di Perairan Sulawesi, Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur dengan koordinat 03.09.00 LU-118.46.00 BT dan memiliki kekayaan alam berupa kandungan minyak mentah sekitar 68 juta barel dan 348 milyar kubik gas bumi. (law.fsu.edu 2013) Kandungan minyak mentah dan gas alam tersebut menyebabkan wilayah Ambalat menjadi strategis bagi Indonesia dan Malaysia. Situasi tersebut kemudian menjadikan Ambalat sebagai wilayah yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Ambalat.

Dalam sejarah kasus Ambalat, setidaknya terdapat tiga fase dalam dinamika konfliknya. Fase pertama adalah ketika terjadi saling klaim awal terhadap wilayah ini pada tahun 1967. Kondisi ini kemudian direspon oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian Tapal Batas yang mengatur perbatasan wilayah perairan Indonesia Malaysia (Departement of State United State of America T.T.). Perjanjian ini menandai penurunan intensitas konflik yang terjadi di Ambalat (Departement of State United State of America T.T.). Setelah ditandatangani perjanjian Tapal Batas, dinamika konflik Indonesia Malaysia terakut kasus Ambalat relatif menurun.

Fase kedua dimulai pada tahun 1979 ketika Malaysia secara sepihak mengeluarkan peta wilayah yang dibuat oleh Malaysia sendiri tanpa konsensus dengan pihak Indonesia. Peta ini bermasalah karena secara sepihak Malaysia melebarkan wilayahnya hingga mencakup wilayah Pulau Sebatik di wilayah Blok Ambalat. Kemudian eskalasi konflik di

Ambalat relatif stagnan, tidak ada pelanggaran wilayah secara masif yang dilakukan oleh Malaysia.

Namun, pada tahun 2005 intensitas konflik kembali meningkat, yang menandai masuknya dinamika konflik pada fase ketiga. Pada tahun 2005 konflik kembali terjadi setelah perusahaan pengelola minyak Malaysia, Petronas, memberikan konsesi eksplorasi kepada Shell untuk eksplorasi minyak di wilayah perairan Ambalat ([asiaquarterly.com](http://asiaquarterly.com) 2005). Shell sempat mengadakan kerjasama dengan Indonesia pada tahun 1999 kemudian pada tahun 2001 memutuskan kerjasama. Pasca 2001, Indonesia memberikan hak eksplorasi minyak kepada ENI, sebuah perusahaan eksplorasi minyak asal Italia. Pada tahun 2005 ternyata Shell mengadakan kerjasama dengan Malaysia untuk eksplorasi minyak di blok ND 6 dan ND 7. Blok ND 6 dan ND 7 adalah blok yang sama yang digunakan dalam kerjasama ENI dan Indonesia. Kerjasama tersebut didasarkan pada peta dari Malaysia yang di buat sebelum adanya Perjanjian Tapal Batas, sehingga validitas kerjasama tersebut kemudian dipertanyakan oleh pihak Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh pihak Shell yang mengatakan bahwa peta kerjasama antara Shell dan Petronas adalah hasil kajian dari Petronas yang dipaparkan pada tender terbuka ([berita.liputan6.com/](http://berita.liputan6.com/) 2005).

Konflik tersebut membawa Ambalat ketingkat dinamika konflik paling tinggi pada tahun 2005. Pada tahun 2005 konflik Ambalat menjadi konflik yang direspon secara serius oleh kedua negara, Indonesia Malaysia. Pada tahun ini dinamika konflik digambarkan paling dinamis. Berbagai macam kebijakan luar negeri diambil oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Tercatat lima jenis kebijakan luar negeri dikeluarkan oleh Indonesia pada kurun waktu 2005. Kebijakan tersebut antara lain: melayangkan nota protes, patroli militer di perairan Ambalat, pembangunan mercusuar dan perundingan diplomatik (Setyaningrum 2005). Dari situ kemudian tulisan ini mengambil lingkup waktu tahun 2005 sebagai tahun penelitian dengan asumsi dinamika kebijakan luar negeri yang terjadi terkait dengan artikulasi identitas yang menjadi latar belakang politik luar negeri.

Secara kronologis, pada tanggal 21 Februari 2005 sampai 14 April 2005 Indonesia mengadakan proyek pembangunan mercusuar di wilayah Karang Unarang yang berada dikawasan Kalimantan Timur di sekitar perairan Ambalat (Dhani 2005).

**Gambar III.1.**



Sumber: <http://news.liputan6.com/read/96983/pembangunan-mercusuar-karang-unarang-dihentikan-sementara> [diakses 03 Juni 2013].

Karang Unarang adalah wilayah yang diperepsi wilayah yang sering dilanggar oleh kapal Malaysia dan masuk ke wilayah Ambalat. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa posisi Karang Unarang berada tepat di sebelah Utara wilayah Ambalat, sehingga untuk menjaga wilayah Ambalat terhitung strategis jika wilayah Karang Unarang dijadikan basis pertahanan pertama. Komandan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Timur Laksamana Pertama Soeparno mengatakan bahwa tujuan dibangunnya mercusuar di Karang Unarang adalah untuk menunjukkan eksistensi Negara Indonesia sebagai klaim politis atas wilayah Ambalat (news.liputan6.com 2005). Pernyataan tersebut mengindikasikan kostruksi kepentingan Indonesia yang melatar belakangi kebijakan ini adalah untuk menjaga keutuhan kedaulatan Indonesia melalui klaim politis atas Ambalat. pernyataan elite dan kebijakan luar negeri tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kebijakan dan pernyataan terkait kebijakan Indonesia di Karang Unarang dilatar belakangi oleh identitas kepulauan berdasarkan Deklarasi Djuanda karena Karang Unarang berada di dalam 12 mil laut Indonesia.

Selama pembangunan mercusuar di Karang Unarang, sempat terjadi *gunboat diplomacy*<sup>1</sup> antara militer Indonesia dan militer Malaysia (Guerin 2005). Melalui pernyataan Laksamana Pertama Abdul Malik Yusuf, *We will not let an inch of our land or a drop of our ocean fall into the hands of foreigners*, (Moore 2005) dapat diinterpretasikan bahwa Dari pernyataan Laksamana Pertama Abdul Malik Yusuf secara tekstual memuat pernyataan bahwa pemerintah, dalam hal ini instrumen militer yang ditempatkan di wilayah perbatasan, tidak akan membiarkan sejenkal wilayah Indonesia lepas dari kedaulatan Indonesia. Sedangkan impelmentasi kebijakannya adalah dengan

---

<sup>1</sup>Meminjam penjelasan Thomas Scilling dalam *Arms and Influence*, Gunboat diplomacy adalah menggunakan kapal kecil untuk membawa meriam (dalam konteks meletusnya pemberontakan Boxer di Sungai Yang Tse) untuk membombardir pelabuhan lawan agar lawan menuruti tuntutan negara pengguna gunboat.

mengadakan *gunboat diplomacy* dengan Malaysia. Identitas pendukung perdamaian dunia secara interpretatif menjadi latar belakang kebijakan ini karena Indonesia memilih untuk tidak mengadakan kontak senjata melainkan memilih untuk menggunakan efek *deterrence*.

Kemudian digunakan model politik luar negeri diplomatik berwujud perundingan secara langsung antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawai dilanjutkan dengan kunjungan Menlu Hasan Wirayudha ke Malaysia pada tanggal 9 Maret 2005 untuk berunding terkait perbatasan Indonesai Malaysia khususnya di wilayah Laut Sulawesi (fkpmaritim.org t.t.). Terkait kebijakan ini, Juru Bicara Departemen Luar Negeri pada saat itu Marty Natalegawa, “satu dari sederet kesepakatan adalah mengurangi ketegangan dan berupaya [lagi] menyelesaikan persoalan secara damai.” (Stephen 2009) Dari pernyataan tersebut, interpretasi yang muncul adalah bahwa penggunaan cara-cara diplomatik tidak membuat Indonesia kemudian bersikap melunak terkait kedaulatan wilayah Ambalat. Wilayah Ambalat tetap dipertahankan didalam kedaulatan Indonesia. Sebagaimana dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa penyelesaian diplomatik dengan cara apapun, Kedaulatan dan Integritas wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) haruslah ditegakkan (fkpmaritim.org t.t.). Dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, didapat konstruksi perepsi bahwa walaupun menempuh jalur diplomatik, tujuan akhirnya tetap mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia dan Ambalat termasuk didalamnya. Konsep kedaulatan laut yang dianut Indonesia adalah berdasarkan Deklarasi Djuanda tahun 1957, sehingga dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan pihak Malaysia didasarkan pada artikulasi identitas Indonesia sebagai negara kepulauan.

Setelah melakukan perundingan dengan Perdana Menteri Malaysia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian melakukan kunjungan ke daerah Ambalat dengan menaiki KRI KS Tubun (Gatra.com 2005). Dalam kunjungan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Seskab Sudi Silalahi, Mensos Bachtiar Chamsyah dan Menakertrans Fahmi Idris. Dari komposisi rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, nampak bahwa konflik wilayah Ambalat bukan hanya persoalan klaim wilayah, namun juga soal keamanan, perhubungan dan konteks sosial. Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan ini merupakan wujud kebijakan luar negeri, karena sebagaimana dikatakan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto bahwa kehadiran Presiden dan rombongan di Ambalat adalah untuk menegaskan eksistensi wilayah masing-masing (dengan Malaysia) (Hertanto 2005).

Berkaitan dengan hal penegasan kedaulatan wilayah dan dalam tujuan membangun persepsi kenegara lain, maka kunjungan presiden dan rombongan tersebut termasuk dalam kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri Indonesia yang diwujudkan dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan klaim atas eksistensi kedaulatan Indonesia di wilayah Ambalat. Dalam kaitan ini kebijakan luar negeri kunjungan presiden ke wilayah Ambalat lebih dekat dengan artikulasi identitas kepulauan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, identitas kepulauan Indonesia diartikulasikan secara berkelanjutan oleh presiden di tiap periode kepemimpinannya berdasarkan Deklarasi Djuanda. Sehingga dalam kebijakan kunjungan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengartikulasikan identitas kepulauan Indonesia berdasarkan Deklarasi Djuanda yang memasukkan wilayah Ambalat dan Karang Unarang ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Interpretasi ini merupakan hasil dari pemaknaan terhadap pernyataan elite dan implementasi dalam aksi kebijakan Presiden mengunjungi wilayah Ambalat. Dari kedua hal tersebut didapatkan interpretasi bahwa pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto merupakan penjelasan dari kunjungan SBY ke Ambalat.

Dari sini dapat diinterpretasikan keselarasan antara pernyataan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dengan kebijakan SBY yang sama-sama menegaskan pemaknaan terhadap kedaulatan Indonesia di Ambalat. Sebagaimana pembahasan dalam kebijakan sebelumnya, bahwa pemaknaan kedaulatan Indonesia didasarkan pada Deklarasi Djuanda. Hal ini menyebabkan Indonesia mengklaim kawasan Ambalat masuk dalam kedaulatannya. Pemaknaan ini terhadap konsepsi kedaulatan dan kepulauan Indonesia ini melatar belakangi munculnya pernyataan dan kebijakan dari Presiden SBY tersebut. Sehingga simpulannya adalah bahwa kebijakan kunjungan SBY ke daerah sengketa Ambalat dilatar belakangi oleh identitas Indonesia sebagai negara kepulauan.

Indonesia mengeluarkan SK Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005 yang menyatakan bahwa pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap kedepankan perdamaian dan TNI AL hanya diperbolehkan melepaskan tembakan bilamana setelah diawali adanya tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu (indomiliter.com 2013). Pernyataan elite yang berhubungan dengan keluarnya peraturan ini adalah berdasarkan `Rule of Engagement` (Aturan Pelibatan) yang berlaku saat ini, yaitu Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005, pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap banyak mengalah (antaranews.com t.t.). Sehingga interpretasi yang kemudian muncul adalah kebijakan ini

mengandung artikulasi identitas pendukung kedamaian dunia dengan cara non kekerasan. Simpulan interpretatif ini muncul sebagai pemaknaan terhadap aksi kebijakan dan pernyataan elite yang cenderung searah tersebut. Arah kedua kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pengeluaran Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005 tersebut ditujukan untuk menghindari kondisi kontak senjata secara langsung yang dapat mengganggu perdamaian dunia. Dari sini interpretasi yang muncul adalah bahwa kebijakan tersebut muncul dari latar belakang identitas pendukung perdamaian dunia.

Eksekusi kebijakan luar negeri selanjutnya adalah Indonesia mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia terkait kasus Ambalat. Sebagaimana dikatakan Teuku Faizasyah, Juru Bicara Deplu, "Deplu sudah mengirimkan nota protes ke Malaysia dan disampaikan ke Kuala Lumpur...ini untuk penegasan bahwa itu wilayah kedaulatan kita." (Safa 2009). Dari pernyataan elite tersebut, simpulan interpretatif yang dapat ditarik adalah dilayangkannya nota protes kepada Malaysia oleh pemerintah Indonesia didasarkan pada identitas negara kepulauan yang diartikulasi melalui Deklarasi Djuanda. Dalam Deklarasi Djuanda Ambalat diklaim sebagai milik Indonesia. Hal ini yang ditegaskan oleh pemerintah Indonesia melalui nota protes kepada Malaysia. Interpretasi dari kebijakan pengiriman nota protes kepada Malaysia adalah bahwa Indonesia memprotes keras pelanggaran kedaulatan yang dilakukan Malaysia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan elite yang mengatakan secara eksplisit bahwa nota protes tersebut adalah kebijakan untuk menegaskan bahwa Ambalat adalah milik Indonesia. Kesesuaian antara pemaknaan konsep kepulauan dalam Deklarasi Djuanda, pernyataan elite dan eksekusi kebijakan oleh pemerintah mengindikasikan bahwa kebijakan ini dilatar belakangi oleh identitas Indonesia sebagai negara kepulauan.

Ekskusi kebijakan luar negeri selanjutnya adalah dilakukannya tiga pertemuan tim teknis kedua negara untuk merundingkan batas-batas wilayah kedua negara. Perundingan bilateral tersebut dilaksanakan pada tanggal 22-23 Maret 2005 (Hertanto 2005). Kebijakan perundingan antara tim teknis Indonesia dan Malaysia pada tanggal didasari oleh orientasi menghindari penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian kasus Ambalat. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayudha, "Kita akan melakukan perundingan. Kehadiran kapal perang tidak diperlukan di kawasan Ambalat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perundingan... Kalau pun terdapat kehadiran beberapa kapal perang TNI AL atau Tentara Diraja Malaysia, itu hanya merupakan bagian dari patroli rutin. (Hertanto 2005)" Pernyataan Hasan Wirayudha tersebut mengindikasikan usaha Indonesia untuk mengurangi penggunaan armada militer dalam

penyelesaian kasus Ambalat. Dalam pernyataan tersebut yang ditekankan oleh Indonesia adalah aspek perundingan dalam suasana yang kondusif, sehingga penggunaan aspek militer dapat dihindari.

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 25-26 Mei 2005 yang membahas tentang pengakuan Malaysia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS tahun 1982. Selain itu pertemuan ini juga membahas tentang kemungkinan penyelesaian kasus sengketa Ambalat melalui jalan damai (Hayid 2005). Dalam pengambilan kebijakan luar negeri ini, Indonesia mendasarkannya pada identitas kepulauan dengan pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan oleh Malaysia. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga diadakan pada 27- 28 September 2005 menghasilkan keputusan penggunaan UNCLOS 1982 dan peta laut British Admiralty Chart sebagai dasar persepsional untuk menghasilkan keputusan selanjutnya yang sifatnya lebih teknis terkait perbatasan umumnya dan Sengketa Ambalat khususnya. Pernyataan tersebut kemudian merefleksikan kedekatan kebijakan luar negeri pertemuan tim teknis ketiga pada tanggal 27- 28 September 2005 terhadap identitas Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dari pembahasan tersebut, kesimpulan yang kemudian didapatkan adalah bahwa identitas kepulauan dan pendukung perdamaian dunia berpengaruh dalam pembentukan politik luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat tahun 2005. Terdapat pemetaan latar belakang pembentukan rangkaian kebijakan luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat tahun 2005 yang dapat disimpulkan dari pembahasan bab III. Secara kronologis, pemetaannya sebagai berikut: proyek pembangunan mercusuar di wilayah Karang Unarang cenderung dekat dengan artikulasi identitas kepulauan dan berperan aktif menjaga kemandirian dunia, sedangkan *gunboat diplomacy* hanya didasari oleh identitas berperan aktif dalam menjaga keamanan dunia. Kemudian kebijakan luar negeri pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawai cenderung memiliki nilai-nilai identitas negara kepulauan dan menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, kebijakan SBY untuk berkunjung ke daerah Ambalat didasari oleh identitas sebagai negara kepulauan. Berbeda dengan sebelumnya, kebijakan penerbitan SK Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 didasari oleh identitas berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia melalui cara-cara non kekerasan. Kemudian nota protes oleh Indonesia kepada Malaysia didasari oleh artikulasi identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Selanjutnya pertemuan tim teknis Indonesia dan Malaysia yang pertama tanggal 22-23 Maret 2005 dan yang kedua tanggal 25-26 Mei 2005 mengandung artikulasi identitas negara kepulauan dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, sedangkan pertemuan ketiga tanggal 27-28

September 2005 mengartikulasikan identitas sebagai negara kepulauan. Yang terakhir, kebijakan eksplorasi blok Ambalat mengartikulasikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan.

Temuan dari penelitian ini, bahwa politik luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat dipengaruhi oleh konstruksi identitas kepulauan dan pendukung keamanan dunia, diharapkan memperkuat nuansa baru dalam studi politik luar negeri Indonesia. Pembahasan konvensional politik luar negeri Indonesia yang didasarkan pada aspek material mengenai kepentingan nasional Indonesia yang selama ini menjadi arus utama dalam analisis politik luar negeri ternyata menyimpan muatan ideasional berupa konstruksi identitas dibaliknya. Proposisi ini kemudian memunculkan celah untuk mengembangkan studi politik luar negeri Indonesia kearah paradigma yang lebih luas.

Studi kasus Ambalat sebagai sengketa wilayah perbatasan bukan yang pertama dialami oleh Indonesia, sebelumnya telah terjadi kasus sengketa perbatasan di wilayah Perairan Sipadan dan Ligitan serta Pulau Sebatik. Yang menarik dari formasi fenomena tersebut adalah hasil akhir ketiga fenomena tersebut yang berbeda. Sipadan Ligitan secara hukum telah menjadi milik Malaysia, Pulau Sebatik secara otoritatif dikelola bersama Indonesia dan Malaysia, sedangkan Ambalat masih belum disepakati penyelesaiannya. Anomali kasus perbatasan tersebut mengindikasikan ketersediaan ruang bagi analisis politik luar negeri Indonesia yang sifatnya dinamis. Akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya studi tentang politik luar negeri Indonesia dari aspek ideasional.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku dan Jurnal:**

- Anwar, Dewi Fortuna. 1994. *Indonesia in ASEAN: Foreign Policy and Regionalism*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Chalmers, Ian. 1998. "Review Buku:Indonesia's Strategic Culture: Ketahanan Nasional. Wawasan Nusantara and Hankamrata". *Australian Journal of International Affairs*. (52) 2 Juli 1998: 214-216.
- Clunan, Anne. 2009. *The Social Construction of Russia's Resurgence* . Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 3.
- Dharmaputra, Radityo. 2010. *Identitas dan Kebijakan Luar Negeri: Pengaruh Nilai-Nilai Eurasianisme Terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia Tahun 2004-2009*. Skripsi Sarjana. Surabaya: Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga.

- Djafar, Zainuddin. 2004. "Politik Luar Negeri Indonesia: Pantulan dari 'Weak State' dan Masa Transisi yang Berkepanjangan", *Minor Major Issues: Tantangan bagi Pemerintah Baru*, Global Jurnal Politik Internasional. Vol.7 No.1 November, 2004.
- Guerin, Bill. 2005. "Sulawesi Sea Row Dregges up Defenses". *The Indonesian Quaterly*, Volume.34 (3). CSIS.
- Griffiths, Martin dan Terry O'Callaghan. 2002. *International Relations, the Key Concepts*. London: Routledge, 50.
- Guzzini, Stefano dan Anna Leander. 2006. *Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics*. New York: Routledge.
- Hansen, Lene. 2006. *Security as Practice: Discourse Analysis and The Bosnian War*. New York: Routledge.
- Hirshberg, Matthew. 1993. "The Self-Perpetuating National Self-Image: Cognitive Biases in Perceptions of International Interventions", *Political Psychology*, Volume. 14, (1), 77-98.
- Holsti, K. J. 1983. *International Politics, A Framework for Analysis*, 4<sup>th</sup> edition. London: Prentice Hall, 97.
- Hopf, Ted. 2002. *Social Construction of International Politics: Identities and Foreign Policies, Moscow, 1955 & 1999*. Ithaca. New York: Cornell University Press, 5.
- Hudson, M. Valerie. 2007. Introduction : The Situation and Evolution of Foreign Policy Analysis : A Road Map dalam *Foreign Policy Analysis : Classic and Contemporary Theories*. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 3-33.
- Jepperson, Ronald L., Alexander Wendt, dan Peter J. Katzenstein. 1996. Norms, Identity, and Culture in National Security dalam Peter J. Katzenstein. 1996. *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press, 10.
- Kroef, Justus M. van der. 1951. "The Term Indonesia: Its Origin and Usage". *Journal of the American Oriental Society* Volume: 71 (3), 166.
- Kusumoprojo, Wahyono Suroto. 2009. *Indonesia Negara Maritim*. Penerbit Teraju: Jakarta Selatan, 186.
- Leifer, Michael. 1983. *Indonesia's Foreign Policy*. London: Royal Institute of International Affairs.
- Masrie, Aspiannor. 2012. *Political Psychology Susilo Bambang Yudhoyono in Bilateral Relations Troubleshooting in Indonesia-Malaysia Approach to Political Economy*. Dalam *Indonesia Malaysia. 6th Conference, 10-12 July 2012*. Surabaya: Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Neack, Laura. 2008. *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era* 2<sup>nd</sup> edition. Plymouth: Rowman and Littlefield Publisher, 9.

- Rosenau, James N., Introduction: New Directions and Recurrent Questions in the Comparative Study of Foreign Policy, dalam Charles F. Hermann, Charles W. Kegley Jr., James N. Rosenau (eds).1987. *New Directions in the Study of Foreign Policy*. Boston: Allen & Unwin, 2.
- Rudolfo, C. 2006. *Severino: South East Asia in search of an ASEAN Community*. Singapore: Utopia Press, 26-28.
- Setyaningrum, Putri Dwi. 2009. *Media Massa Indonesia dan Kebijakan Luar Negeri dalam Contoh Kasus Ambalat Tahun 2005*. Skripsi Sarjana. Surabaya:Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga.
- Sukma, Rizal. 2011. "Indonesia Finds a New Voice". *Journal of Democracy*, Volume 22 Number 4, October 2011.
- Sulistiyo, Priyambudi. 2010. "Indonesia-Australia Relations in the Era of Democracy: The View from the Indonesian Side" . *Australian Journal of Political Science*, Volume 45 Issue 1, 2010.
- Wendt, Alexander. t.t. "Collective Identity Formation and International State," *The American Political Science Review*, 385.
- Wicaksana, I Gede Wahyu. 2012. *Islam And Indonesia's Foreign Policy, With Special Focus On Jakarta-Islamabad Relations*. Disertasi Doktor. Perth: School of Social Sciences Discipline of Political Science and International Relations Centre for Muslim States and Societies, The University of Western Australia.
- Wilkenfeld, Jonathan, et al, . 1980. *Foreign Policy Behaviour, The Interstate Behaviour Analysis Model*. London: Sage, 110.
- Zehfuss, Maja. *Constructivism and Identity*, dalam Stefano Guzzini dan Anna Leander. 2006. *Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics*. New York: Routledge, 94.

### **Sumber-Sumber Online:**

- Antaranews.com.t.t. *Deplu Kumpulkan Fakta Resmi Pelanggaran Malaysia atas Wilayah RI* [online] dalam <http://www.antaranews.com/print/54710/deplu-kumpulkan-fakta-resmi-pelanggaran-malaysia-atas-wilayah-ri> [diakses 04 Juni 2013].
- Arifin, Saru. t.t. *Pelaksanaan Asas Utī Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia* [online] dalam <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/2%20Sar%20Arifin.pdf> [diakses 27 Mei 2013].
- Amri, Arfi Bambani dan Dedy Priatmojo. 2011. *Penjelasan Megawati Soal Lepasnya Sipadan* [online] dalam

- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/255702-penjelasan-megawati-soal-lepasnya-sipadan> [diakses 02 Juni 2013].
- Berita8.com. 2009. *Kofi Annan Biangkerok Lepasnya Timor Timur dari RI* [online] dalam <http://www.berita8.com/news.php?tgl=2009-11-09&cat=1&id=16318> [diakses 01 Juni 2013].
- Carsis.ubb.ac.id, *UUD 1945 Amandemen 4 Version 2* [online] dalam [www.carsis.ubb.ac.id/files/UUD\\_TH\\_1945\\_AMANDEMEN\\_4\\_VERSION\\_2.pdf](http://www.carsis.ubb.ac.id/files/UUD_TH_1945_AMANDEMEN_4_VERSION_2.pdf) [diakses 01 Juni 2013].
- Datahukum.pnri.go.id, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008* [online] dalam [http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&download=546:uuno43th2008&id=20:tahun-2008&Itemid=27&start=40](http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=546:uuno43th2008&id=20:tahun-2008&Itemid=27&start=40) [diakses 01 juni 2013].
- Departement of State United State of America. *International Boundary Study* [online] dalam <http://www.law.fsu.edu/library/collection/LimitsinSeas/lsoo1.pdf> [diakses 03 Juni 2013].
- Deplu.go.id.2010. *Menlu RI: Indonesia Siap Jalin Hubungan Diplomatik dengan 21 negara PBB* [online] dalam <http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4222&l=id> [diakses 02 Juni 2013].
- Dhani, Ahmad. 2005. *RI akan Bangun 20 Mercusuar di Karang Unarang*[online] dalam <http://news.detik.com/read/2005/03/14/132230/316577/10/ri-akan-bangun-20-mercusuar-di-karang-unarang> [diakses 03 Juni 2013].
- Fasabeny, Muhammad.2005. *Indonesia Tetap Eksplorasi East Ambalat* [online] dalam <http://www.tempo.co/read/news/2005/03/01/05657258/Indonesi-Tetap-Eksplorasi-East-Ambalat> [diakses 04 Juni 2013].
- Fkpmaritim.org.t.t.*Konflik Ambalat dan Strategi Maritim* [online] dalam <http://www.fkpmaritim.org/?p=552> [diakses 03 Juni 2013].
- Gatra.com.2005. *Presiden akan Tinjau Karang Unarang* [online] dalam [arsip.gatra.com//2005-03-07/artikel.php?id=82519](http://arsip.gatra.com//2005-03-07/artikel.php?id=82519) [diakses 04 juni 2013].
- Hamdani, M. Ibrahim.2013. *Peran Gus Dur dalam Misi Perdamaian Israel-Palestina* [online] dalam <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,42801-lang,id-c,kolom-t,Peran+Gus+Dur+dalam+Misi+Perdamaian+Israel+Palestina-.phpx> [diakses 02 Juni 2013].
- Havard Asia Quarterly, 2005, *Energy Security and Southeast Asia: The Impact on Maritime Boundary and Territorial Dispute* [online] dalam <http://www.asiaquarterly.com/content/view/160/> [diakses 03 Juni 2013].

- Hayid, Muhamad Nur. 2005. *RI-Malaysia Lanjutkan Perundingan Ambalat 25-26 Mei* [online] dalam <http://news.detik.com/read/2005/05/20/132524/365808/10/ri-malaysia-lanjutkan-perundingan-ambalat-25-26-mei?nd992203605> [diakses 04 Juni 2013].
- Hertanto, Luhur. 2005. *SBY Tinjau Pos TNI di Perbatasan* [online] dalam <http://news.detik.com/read/2005/03/07/002405/311329/10/sby-tinjau-pos-tni-di-perbatasan?nd771108bcj> [diakses 04 Juni 2013].
- Hertanto, Luhur. 2005. *Tim Teknis RI-Malaysia Berunding Soal Ambalat 22-23 Maret* [online] dalam <http://news.detik.com/read/2005/03/11/121520/315195/10/tim-teknis-ri-malaysia-berunding-soal-ambalat-22-23-maret> [diakses 04 Juni 2013].
- Indonesiamission-ny.org. t.t. *Pidato Presiden Republik Indonesia Pada Sidang Majelis Umum ke-58 Perserikatan Bangsa-Bangsa* [online] dalam [http://www.indonesiamission-ny.org/NewStatements/unga58\\_092303\\_ind.htm](http://www.indonesiamission-ny.org/NewStatements/unga58_092303_ind.htm) [diakses 02 Juni 2013].
- Indonesianvoices.com. 2012. *Pidato Ir. Soekarno pada Saat Konferensi Asia Afrika di Bandung Tahun 1955* [online] dalam <http://www.indonesianvoices.com/index.php/sejarah-kemerdekaan/1203-pidata-ir-soekarno-pada-saat-konferensi-asia-afrika-di-bandung> [diakses 02 Juni 2013].
- Indomiliter.com. 2013. *Bila Perang Itu Akhirnya Tiba* [online] dalam <http://indomiliter.com/2013/06/01/bila-perang-itu-akhirnya-tiba/> [diakses 04 Juni 2013].
- Kepustakaan-presiden.pnri.go.id. t.t. *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bacharudin Jusuf Habibie* [online] dalam [http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded\\_files/pdf/speech/normal/habibie1.pdf](http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/speech/normal/habibie1.pdf) [diakses 02 Juni 2013].
- Kkp.go.id. 2010. *Gus Dur dan Masa Depan Kelautan* [online] dalam [http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/2602/GUS-DUR-DAN-MASA-DEPAN-KELAUTAN/?category\\_id=](http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/2602/GUS-DUR-DAN-MASA-DEPAN-KELAUTAN/?category_id=) [diakses 01 Juni 2013].
- Kontras.org. t.t. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003* [online] dalam [http://www.kontras.org/uu\\_ri\\_ham/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202003%20tentang%20Anti%20Terorisme.pdf](http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202003%20tentang%20Anti%20Terorisme.pdf) [diakses 02 Juni 2013].
- Kurniawan, Yophiandi. 2005. *Protes Indonesia atas Ambalat* [online] dalam <http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2005/02/27/brk,20050227-17,id.html> [diakses 04 Juni 2013].

- Library.ohio.edu. 2001. *Pengakuan Habibie Soal Timtim* [online] dalam <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/08/27/0134.html> [diakses 02 Juni 2013].
- Lintas.me. t.t. *Indonesia Hanya Memiliki 8 Provinsi Pada Awal Kemerdekaan* [online] <http://indonesiaku.lintas.me/go/asalalah.blogspot.com/indonesia-hanya-memiliki-8-provinsi-di-awal-kemerdekaan> [diakses 01 Juni 2013].
- Liputan 6, 2005, *Menghitung Nilai Ekonomi Perairan Ambalat* [online] dalam <http://berita.liputan6.com/ekbis/200503/97281/Menghitung.Nilai.Ekonomi.Perairan.Ambalat> [diakses 03 Juni 2013].
- Makalahpedia.com. 2012. *Pemerintahan B.J. Habibie* [online] dalam <http://makalahpedia.com/3009/makalah-sejarah/pemerintahan-bj-habibie.html> [diakses 02 Juni 2013].
- Marzali, Amri dalam Bramantyo. 2013. *Kultur Indonesia - Malaysia Tidak Berbeda* [online] dalam <http://jakarta.okezone.com/read/2013/05/17/407/808468/kultur-indonesia-malaysia-tidak-berbeda> [diakses 27 Mei 2013].
- Metro.polri.go.id. 2009. *Dirgahayu Nusantara 13 Desember 1999 - 13 Desember 2009* [online] dalam <http://www.metro.polri.go.id/perpus/317-dirgahayu-nusantara-13-desember-1999-13-desember-2009> [diakses 01 Juni 2013].
- Moore, Matthew. 2005. *Indonesia tries gunboat diplomacy in dispute with Malaysia* [online] dalam <http://www.smh.com.au/news/World/Indonesia-tries-gunboat-diplomacy-in-dispute-with-Malaysia/2005/03/07/1110160758980.html> [diakses 03 Juni 2013].
- Mubarak, Abdullah. 2010, *Inilah Pidato Soekarno 'Ganyang Malaysia'* [online] dalam <http://www.inilah.com/read/detail/777221/inilah-pidato-soekarno-ganyang-malaysia/> [diakses 01 Juni 2013].
- Nu.or.id. 2010. *Kementerian Kelautan Kenang Jasa Gus Dur* [online] dalam <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,22675-lang,id-c,warta-t,Kementerian+Kelautan+Kenang+Jasa+Gus+Dur-.phpx> [diakses 02 Juni 2013].
- Presiden.go.id. 2009. *Dialog Capres Acara 'Ring Politik' di ANTV* [online] dalam <http://www.presidenri.go.id/index.php/wawancara/2009/06/05/138.html> [diakses 02 Juni 2013].
- Presidenri.go.id . 2009. *Disepakati, Penyelesaian Ambalat Melalui Perundingan* [online] dalam <http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2009/04/23/4236.html> [diakses 02 juni 2013].

- Presidenri.go.id.2010. *Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI* [online] dalam <http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/2010/08/16/1457.html> [diakses 02 Juni 2013].
- Presiden.pnri.go.id. t.t. *Pidato Kenegaraan Presiden RI Soeharto di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1991* [online] dalam [http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/speech/?box=detail&id=102&from\\_box=list\\_6XX\\_245&hlm=1&search\\_6XX=ASEAN&presiden\\_id=2&presiden=suharto](http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/speech/?box=detail&id=102&from_box=list_6XX_245&hlm=1&search_6XX=ASEAN&presiden_id=2&presiden=suharto) [diakses 02 Juni 2013].
- Safa, Maria Ulfa Eleven.2009. *Nota Protes Deplu Tegaskan Ambalat Milik Indonesia* [online] dalam <http://news.okezone.com/read/2009/06/05/1/226412/nota-protes-deplu-tegaskan-ambalat-milik-indonesia> [diakses 04 Juni 2013].
- Sasmini, *Hak Lintas Damai di Laut Teritorial (Kajian Historis)* [online] dalam <http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2010/08/13/hak-lintas-damai-di-laut-teritorial/> [diakses 01 Juni 2013].
- Solikin, M. t.t. NKRI Harga Mati [online] dalam [www.dprdkedirib.go.id/NEWS/Berita-113.htm](http://www.dprdkedirib.go.id/NEWS/Berita-113.htm) [diakses 01 Juni 2013].
- Sorensen, Jackson. 2006. *Social Constructivism*[online] dalam [http://www.oxfordtextbook.co.uk/orc/Jackson\\_sorensen3e/](http://www.oxfordtextbook.co.uk/orc/Jackson_sorensen3e/) [diakses 28 Mei 2013]
- Stephen, M.I. V. 2009. *Bersama Tokek Berandai-andai [Lagi] buat Ambalat* [online] dalam <http://news.liputan6.com/read/233700/bersama-tokek-berandai-andai-lagi-buat-ambalat> [diakses 03 Juni 2013].
- Tahier, A. t.t. *Perkembangan dan Pelaksanaan Dwifungsi ABRI dalam Rangka Melestarikan Pancasila (Suatu Tinjauan Pada Masa Orde Baru)* [online] dalam <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=83088> [diakses 02 Juni 2013].
- Thamrin, Yuri.2005. *Pokok-Pokok Press Briefing Juru Bicara Deplu, Yuri O. Thamrin Tanggal 30 September 2005* [online] dalam <http://www.deplu.go.id/Pages/PressBriefing.aspx?IDP=30> [diakses 04 Juni 2013].
- Weatherbee, Donald E. 2005. *INDONESIAN FOREIGN POLICY: A Wounded Phoenix* [online] dalam <http://e-resources.pnri.go.id:2058/docview/216936829/13E70B2F1616E8CD981/2?accountid=25704> [diakses 03 Juni 2013].
- Widjanarko, P. 2005. *Ganyang Malaysia dan Nasionalisme Banal* [online] dalam <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0505/02/opini/1722756.htm> [diakses 04 Juni 2013].